



# Analisis Kebijakan Energi Nasional

## Penulis:

Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS | Ir Muhamad Karim, MSi |  
Doni Yusri, SP, MM | Akhmad Solihin, SPi, MH | Lestari Agusalim, SE, MSi |  
Alex Yungan Harahap, SHut | Qiki Qilang Syachbudy, SE |  
Farly Shabahul Khairi, SStat | Fadly Sonata Siregar, Amd | Indra Yudhika Zulmi  
| Mutiono | Fuad Habibi Siregar | Ahmad Arief Hilman

# Analisis Kebijakan Energi Nasional



# Analisis Kebijakan Energi Nasional

## **Penulis:**

Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS

Ir Muhamad Karim, MSi

Doni Yusri, SP, MM

Akhmad Solihin, SPi, MH

Lestari Agusalim, SE, MSi

Alex Yungan Harahap, SHut

Qiki Qilang Syachbudy, SE

Farly Shabahul Khairi, SStat

Fadly Sonata Siregar, Amd

Indra Yudhika Zulmi

Mutiono

Fuad Habibi Siregar

Ahmad Arief Hilman



**Penerbit IPB Press**

Kampus IPB Taman Kencana,  
Kota Bogor-Indonesia

c1/10.2014

**Judul Buku:**

Analisis Kebijakan Energi Nasional

**Penulis:**

Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS  
Ir Muhamad Karim, MSi  
Doni Yusri, SP, MM  
Akhmad Solihin, SPi, MH  
Lestari Agusalim, SE, MSi  
Alex Yungan Harahap, SHut  
Qiki Qilang Syachbudy, SE  
Farly Shabahul Khairi, SStat  
Fadly Sonata Siregar, AMd  
Indra Yudhika Zulmi  
Mutiono  
Fuad Habibi Siregar  
Ahmad Arief Hilman

**Editor:**

Alex Yungan Harahap  
Indra Yudhika Zulmi

**Penyunting Bahasa:**

Nia Januarini

**Desain Sampul:**

Sanny Etyarsah

**Penata Isi:**

Marangkup T Hutauruk

**Korektor:**

Dwi M Nastiti

**Jumlah Halaman:**

158 + 18 halaman romawi

**Edisi/Cetakan:**

Cetakan Pertama, November 2014

**PT Penerbit IPB Press**

Kampus IPB Taman Kencana  
Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128  
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ymail.com

ISBN: 978-979-493-652-8

Di cetak oleh IPB Press Printing, Bogor - Indonesia  
Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

© HMI dan KAHMI Bogor 2014  
HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

# Daftar Isi

Kata Pengantar Rektor Institut Pertanian Bogor.....	v
Sekapur Sirih Koordinator Presidium KAHMI Bogor .....	vii
Pengantar Editor .....	ix
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar .....	xvii

## Bab Satu

### Analisis Kritis terhadap Kebijakan Energi Nasional

- 1.1 Pro dan Kontra terhadap Kebijakan Energi Nasional;  
*Qiki Qilang Syachbudy, SE*..... 3
- 1.2 Dampak Kenaikan BBM terhadap Sektor Perikanan Nasional;  
*Ir Muhamad Karim, MSi* ..... 11
- 1.3 Analisis Kebijakan Kenaikan Harga BBM terhadap Dinamika Sosial Masyarakat;  
*Fuad Habibi Siregar*..... 23
- 1.4 Ekonomi Politik dalam Kebijakan Energi Nasional;  
*Lestari Agusalm, SE, MSi*..... 31
- 1.5 Membangun Hutan dengan Subsidi BBM;  
*Alex Yungan Harahap, SHut*..... 39

## Bab Dua

### Analisis Pembentukan Opini Publik dalam Persoalan Energi Nasional

- 2.1 BBM dalam Angka dan Realita Sosial Masyarakat;  
*Early Shabahul Khairi, SStat*..... 49

- 2.2 Komunikasi Publik dan Manajemen Risiko Kebijakan Energi Nasional;  
*Doni Yusri, SP, MM* ..... 57
- 2.3 Peran dan Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Energi Nasional;  
*Fadly Sonata Siregar, AMd* ..... 67

## Bab Tiga

### Membangun Kemandirian Energi Nasional

- 3.1 Pengembangan Energi dalam Pembangunan Sektor Perikanan;  
*Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS*..... 75
- 3.2 Pengembangan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas;  
*Indra Yudhika Zulmi* ..... 87
- 3.3 Kemandirian Energi Melalui Bioetanol Sorgum sebagai Energi Alternatif;  
*Mutiono*..... 97
- 3.4 Menggugat Aset Pertambangan Indonesia Melalui Semangat Kepentingan Nasional;  
*Ahmad Arief Hilman* ..... 105

## Bab Empat

### Evaluasi Kebijakan Energi Nasional

- 4.1 Evaluasi Kebijakan Kenaikan Harga BBM;  
*Alex Yungan Harahap, SHut*  
*Indra Yudhika Zulmi* ..... 117
- 4.2 Analisis Kebijakan dalam Tata Kelola Energi Indonesia: Studi Kasus Kenaikan Harga Elpiji 12 kg (Januari 2014);  
*Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS*  
*Akhmad Solihin, SPi, MH*..... 145

**Profil Penulis** .....153

## 1.4 Ekonomi Politik dalam Kebijakan Energi Nasional

*Lestari Agusalm, SE, MSi*

### Pendahuluan

Saat ini dunia saling terinterkoneksi antara satu negara dengan negara lain. Sebagai contoh, krisis keuangan di Amerika Serikat dan krisis utang Yunani yang mulai mencuat pada tahun 2008 terbukti merontokkan perekonomian kedua negara tersebut serta melesukan perekonomian negara-negara lain, termasuk Indonesia. Krisis tersebut berdampak pada perekonomian domestik, yaitu terjadinya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menekan pasar Surat Utang Negara (SUN), cadangan devisa yang menurun tajam, dan terdepresiasi nilai rupiah (Kementerian Keuangan, 2010).

Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga dikhawatirkan akan memengaruhi banyak pihak yang berkepentingan. Rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah didasari oleh peperangan yang terjadi di Timur Tengah yang merupakan wilayah penghasil minyak dunia. Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah mengakibatkan lalu lintas minyak dunia terhambat sehingga terjadi kelangkaan BBM dan mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia serta memberikan *contagion effect* ke negara-negara lain. Jika tidak melakukan penyesuaian dengan kenaikan harga minyak dunia, pemerintah menilai kondisi tersebut akan merusak APBN. Kemudian muncul wacana pemerintah untuk meningkatkan harga BBM, yakni sebesar Rp 1.500,00. Pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakilnya Boediono memberikan informasi kepada publik bahwa jika pemerintah tidak segera menaikkan harga BBM pada 1 April 2012, maka APBN akan jebol (Majalah Detik, Edisi 2 April 2012).

Apabila APBN jebol maka asumsi dasar ekonomi makro 2012 tidak akan tercapai, sehingga mengganggu perekonomian nasional. Tabel 3, memberikan gambaran asumsi pemerintah bahwa harga minyak ICP sebesar USD 90 per barel. Sedangkan pada triwulan I di tahun 2012 harga minyak dunia melebihi asumsi makro, yaitu mencapai USD 105 per barel. Oleh karenanya, opsi kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kompensasi dalam bentuk

## Bab Satu

### Analisis Kritis terhadap Kebijakan Energi Nasional

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai oleh pemerintah sebagai opsi terbaik untuk mencapai target ekonomi makro sebagaimana yang tercantun dalam APBN.

**Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2011-2012**

Indikator Ekonomi	2011		2012
	APBN	APBN-P	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,4	6,5	6,7
Inflasi (%)	5,3	5,65	5,3
Nilai Tukar (Rp/USD)	9.250	8.700	8.800
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	6,5*	5,6	6
Harga Minyak ICP (USD/barel)	80	95	90
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel/hari)	970	945	950

\*) APBN 2011 menggunakan asumsi suku bunga SBI 3 bulan

Sumber: Kementerian Keuangan

Senada dengan pemerintah, Jusuf Kalla mengatakan bahwa harga BBM harus naik, bila tidak pemerintah harus mengurangi anggaran belanja pembangunan. Kondisi tersebut akan memperlambat laju pembangunan infrastruktur, jalan-jalan akan semakin macet, anggaran untuk sekolah dan kesehatan serta sarana lain akan dipotong. Anggito Abimanyu juga berpendapat bahwa produksi minyak Indonesia yang hanya 900-an ribu barel/hari kurang dari kebutuhan konsumsi dalam negeri 1,4 juta barel per hari. Dengan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia, maka pengeluaran negara untuk membeli BBM akan makin besar dan artinya makin jauh di atas anggaran yang disiapkan negara. Oleh sebab itu maka jawabannya harga BBM harus naik.

Dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda, muncul suatu pertanyaan apakah dengan semakin meluasnya integrasi ekonomi nantinya akan meruntuhkan kedauletan suatu negara? Pertanyaan ini muncul karena alasan pemerintah menaikkan harga BBM sangat tergantung kepada harga pasar dunia. Dalam pentas perdagangan dunia, Indonesia merupakan negara terbuka kecil sehingga hanya menjadi *price taker*. Apakah Indonesia adalah negara yang lebih liberal dibanding Amerika? Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol harga dunia? Atau jangan-jangan persoalan rencana kenaikan harga BBM tidak semata-mata masalah ideologi, tetapi sesuatu yang lebih 'mengerikan' dari itu. Ada apa sebenarnya di balik angka-angka statistik terkait persoalan BBM yang disebutkan pemerintah?



## Aspek Konstitusi dalam Pembentukan Harga BBM

Berdasarkan konstitusi, telah ditegaskan bahwa Indonesia tidak menganut paham liberalisme terutama untuk sektor-sektor vital seperti BBM. Hal ini tercermin dengan dicabutnya Pasal 28 Ayat (2) dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang bertentangan dengan UUD RI oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 lalu. Tetapi putusan MK ini dilecehkan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Pasal 72 Ayat (1) berbunyi: “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.” Ini adalah liberalisme yang dihaluskan. Undang-Undang ini secara implisit menyatakan bahwa rakyat Indonesia harus membayar BBM sesuai dengan harga pasar internasional, yakni yang ditetapkan oleh *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pernyataan SBY dan Boediono mengenai jebolnya APBN akibat kenaikan harga minyak dunia mengusik beberapa peneliti untuk melakukan hitung-hitungan BBM. Baik Kwik maupun Abimanyu menyatakan bahwa tanpa adanya kenaikan BBM pemerintah sebenarnya telah mengantongi surplus Rp 96,78 triliun. Lebih tajam Kwik mengatakan bahwa pemerintah berbohong bahwa APBN jebol karena BBM. Ia justru berpendapat bahwa kelebihan surplus tersebut adalah bentuk subsidi rakyat kepada pemerintah. Secara implisit, apabila pemerintah berencana menaikkan harga BBM sama artinya dengan pemerintah merasa subsidi yang diberikan oleh rakyat masih kurang, sehingga rakyat harus memberi tambahan subsidi sebesar Rp 1.500,00 per liter. Perlu diketahui bahwa konsumsi BBM adalah 396,226 juta barrel per tahun dan 60 persen dari total konsumsi tersebut merupakan produksi minyak dalam negeri. Rata-rata biaya produksi BBM setelah dikurangi berbagai biaya, kira-kira sebesar Rp 566,00 per liter. Karena pemerintah selalu mengikuti harga minyak internasional maka rakyat harus membayar Rp 4.500,00/liter kepada pemerintah. Berapa keuntungan pemerintah dari minyak domestik? Keuntungan dari minyak domestik tersebut jauh lebih besar dibandingkan beban harga dari impor minyak dunia. Hasil hitung-hitungan tersebut menghasilkan surplus bersih sebesar Rp 96,78 triliun. Tidak cukup dengan itu pemerintah malah ingin menaikkan harga menjadi Rp 6.000,00.

Berbeda dengan Kwik, Abimanyu menilai bahwa apabila harga BBM tidak dinaikkan maka lama kelamaan surplus Rp 96,78 triliun tersebut akan mengecil dan habis. Ia berkesimpulan bahwa harga BBM harus naik mejadi Rp 5.500,00, yakni kenaikan Rp 1.000,00. Opsi kenaikan BBM sebesar Rp

1.500,00 dinilai akan memperburuk perekonomian masyarakat terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Abimanyu juga setuju dengan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM harus diiringi dengan pemberian kompensasi kepada rakyat miskin, tetapi lebih kecil dari yang diusulkan oleh pemerintah.

Kedua pakar tersebut memberikan ilustrasi kepada kita bahwa dengan data yang sama mereka memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki ideologi yang berbeda. Tetapi penulis relatif lebih sependapat dengan Kwik, dengan alasan bahwa jika dilihat dari sektor ekonomi yang paling banyak menggunakan BBM, maka sektor transportasi publik berada pada urutan pertama, kemudian disusul oleh sektor transportasi swasta, kemudian disusul oleh sektor listrik dan gas. Di Indonesia, pengguna transportasi publik pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah, sedangkan pengguna transportasi swasta meliputi seluruh lapisan masyarakat. Kenaikkan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi yang pada akhirnya dibebankan kepada pengguna transportasi umum tersebut.

Kebijakan kenaikan harga bukanlah upaya efisiensi dan pemerataan distribusi pendapatan. Dampak kenaikan harga lebih diderita oleh kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah. Kenaikkan harga BBM memiliki *multiplier effect* ke semua sektor ekonomi yang pada akhirnya mengurangi daya beli atau pendapatan riil masyarakat. Pada tahun 2011, terdapat 30.018.930 jiwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau sekitar 12,63% dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2011). Bagi masyarakat miskin pengurangan pendapatan berdampak pada pengurangan gizi makanan. Selanjutnya mereka akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan seperti yang digambarkan oleh Gunnar Myrdal dalam karya ilmiahnya *Asian Drama* (Damanhuri, 2011). Tentunya sulit bagi pemerintah untuk mencapai target kemiskinan menurun menjadi 7,5% bila gegabah untuk menaikkan harga BBM.

## **Analisis Dampak Kenaikan Harga BBM menggunakan Model CGE**

Penulis mencoba melakukan analisis dampak kenaikan harga BBM terhadap ekonomi makro menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan metode *recursive dynamic*, dengan tiga skenario, yakni; (1) Simulasi 1; Kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500,00 tanpa adanya kompensasi, (2) Simulasi 2; kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500,00 diikuti

adanya kompensasi BBM sebesar Rp 25,6 Triliun, (3) Simulasi 3; peningkatan efisiensi Pertamina sebesar 5% dan peningkatan efisiensi transportasi sebesar 10%. Tujuan analisis ini adalah untuk menilai apakah rencana kebijakan pemerintah secara ekonomi dapat diterima atau tidak.

Tabel 5 memperlihatkan dampak ekonomi makro dari ketiga simulasi di atas. Simulasi 1 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator ekonomi makro mengalami penurunan kecuali inflasi, begitu juga dengan simulasi 2. Dari kedua simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi makro. Artinya, kompensasi tersebut tidak mampu memperbaiki perekonomian akibat kenaikan harga BBM. Simulasi 2 menunjukkan peningkatan inflasi sebesar 0,38%, sehingga mengurangi konsumsi rumah tangga sebesar 0,39%, yang berdampak pada penurunan pendapatan nasional sebesar 0,25%. Kinerja perdagangan juga memburuk ketika terjadi penurunan ekspor maupun impor.

**Tabel 4. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Ekonomi Makro**

Indikator Makro	SIM 1	SIM 2	SIM 3
PDB	-0,25	-0,25	1,34
Inflasi	0,35	0,38	-0,12
Real Household Consumption	-0,37	-0,39	0,82
Pengeluaran Pemerintah	-0,37	-0,39	0,82
Ekspor Total	-0,68	-0,65	1,52
Impor Total	-0,86	-0,89	-1,02

Berbeda dengan simulasi 1 dan simulasi 2, resultan pada simulasi 3 menunjukkan dampak ekonomi makro yang membaik dilihat dari indikator makro ekonomi, di mana pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, dan ekspor meningkat, juga terjadi penurunan inflasi dan impor. Efisiensi transportasi publik dapat ditempuh dengan menyediakan transportasi publik yang nyaman seperti peremajaan bis-bis, membangun monorel dan *Mass Rapid Transit* (MRT) yang menghubungkan berbagai lokasi strategis. Apabila pemerintah fokus dalam meningkatkan efisiensi Pertamina dan efisiensi transportasi publik maka ekonomi makro jauh lebih baik dibandingkan memilih opsi simulasi 1 atau simulasi 2. Analisis ekonomi, kebijakan kenaikan harga BBM tidak tepat sasaran.

## Penutup

Persoalan BBM adalah persoalan yang rumit. Ia tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi lebih dari itu, ia juga memiliki dimensi politik. Apa alasan politik dibalik kenaikan harga BBM? Jawaban persisnya hanya pemerintah yang tahu. Tetapi jika kita mengamati pergolakan politik saat ini, partai pemerintah dalam hal ini Partai Demokrat banyak diduga terlibat kasus korupsi. Tentunya yang saya maksud adalah kader-kader Partai Demokrat. Hasil survei dari beberapa lembaga survei menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat mengalami penurunan yang sangat drastis. Lalu bagaimana caranya agar pemerintahan yang dipimpin oleh SBY kembali mendapat simpati dari masyarakat? Kata kuncinya adalah kompensasi dan sejenisnya. Kebijakan seperti ini biasanya diambil menjelang pemilu juga saat masyarakat sudah tidak simpati kepada pemerintah.

Pemerintah memanfaatkan memontum kenaikan harga minyak dunia, sebagai alasan untuk menaikkan harga minyak domestik dan imbalannya pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin. Sayangnya masyarakat tidaklah sebodoh seperti persepsi pemerintah. Derita akibat kenaikan harga BBM tidak dapat dipulihkan dengan besaran kompensasi yang dicanangkan. Masih teringat segar dalam ingatan ketika menjelang pemilu 2009 pemerintah menurunkan tiga kali harga BBM yang sebelumnya dinaikan terlebih dahulu. Jurus ini jitu untuk mendongkrak popularitas SBY dan partainya ditambah dengan iklan anti korupsi dan penambahan gaji bagi PNS. Tetapi semua iklan anti korupsi tersebut omong kosong belaka. Jika pemerintah ingin mengulangi politik BBM tahun 2008 maka itu takkan berhasil dengan situasi politik hari ini.

Alasan lain pemerintah menginginkan kenaikan harga BBM, yaitu karena kuatnya tekanan asing terhadap perekonomian Indonesia. Kuatnya tekanan asing tersebut tercermin dari ketidakmampuan pemerintah meredam gejolak neo liberalisme dengan menyerahkan harga BBM pada harga internasional. Apabila harga BBM naik, perusahaan minyak seperti Shell, Petronas, dan lainnya akan memiliki daya saing yang relatif lebih tinggi. Menurut Eriyatno (2011), kebijakan ekonomi yang diserahkan ke pasar internasional adalah bentuk imperialisme baru dengan menjajah perekonomian suatu negara.

Hiruk pikuk persoalan BBM semakin memanas ketika media massa proaktif dalam mengawal dan memberikan informasi seputar wacana pemerintah terkait BBM kepada publik. Dikatakan hiruk pikuk karena hampir semua *stakeholder* memainkan drama untuk mendapat simpati masyarakat,

baik itu pihak yang setuju dengan kenaikan harga BBM maupun pihak yang tidak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM. Betapa mudahnya pejabat publik dan wakil rakyat berubah-ubah dalam mengemukakan pendapat. Saat ini saya melihat Partai Demokrat dijadikan bulan-bulanan bersama oleh berbagai partai karena dominasi partai ini begitu kuat. Dalam kondisi partai demokrat yang tersandung banyak masalah, partai-partai lainnya memanfaatkan kondisi ini untuk mendapat perhatian masyarakat sehingga semakin memperkuat partai-partai tersebut.

Persoalan BBM sejatinya bukan masalah kesejahteraan namun lebih didominasi oleh kepentingan politik. Sering kali, ketika kepentingan politik berbenturan dengan masalah kesejahteraan masyarakat, para politikus lebih memilih kepentingan politik. Hal terjadi karena alasan oportunistis. Politikus seperti ini tidak memiliki prinsip dan jiwa kenegaraan. Alhasil keputusan rapat paripurna DPR adalah keputusan yang secara halus meliberalisasi BBM. Selain itu, keputusan tersebut terkesan hanya memperlihatkan eksistensi partai mana yang kuat syahwat politiknya. Akibat dari putusan tersebut maka menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian. Ketidakpastian ini mengakibatkan instabilitas perekonomian. Dengan harga BBM tidak naik saja sudah terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan putusan DPR saat ini, peluang untuk terjadi kenaikan sekali lagi pada harga-harga sangat besar.

Dari berbagai uraian diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat, di antaranya; (1) alasan APBN 2012 jebol karena semakin besarnya beban subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia tidak dapat dibenarkan, (2) berdasarkan resultan simulasi model CGE, terlihat bahwa kenaikan harga BBM yang disertai pemberian kompensasi tidak membuat perekonomian lebih baik daripada tanpa diberikan kompensasi, (3) langkah yang harus segera ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melakukan langkah-langkah efisiensi transportasi publik, efisiensi Pertamina, juga peningkatan infrastruktur. Langkah-langkah ini jauh lebih efektif untuk menyelamatkan dan mendorong perekonomian nasional daripada menggantungkan diri pada pasar bebas.

## Daftar Pustaka

- Damanhuri DS. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan (Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang)*. IPB PRESS. Bogor.
- Eriyatno. 2011. *Membangun Ekonomi Komparatif (Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa)*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Esdmwatch. 2012. Anggito Abimanyu Usulkan BLT Rp 100,00 Per Bulan, Kenaikan BBM Rp1000. [http://www.esdmwatch.com/e1/index.php?option=com\\_content&view=frontpage&Itemid=1](http://www.esdmwatch.com/e1/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1) diakses 3 Mei 2012.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2010. Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 2010. *Buku Putih Upaya Pemerintah da-lam Pencegahan dan Penanganan Krisis*. Edisi Januari 2010. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun Anggaran 2012. Jakarta. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-18,%20NK%20RAPBN%202012.pdf> diak-ses 3 Mei 2012.
- Kwik Kian Gie. 2012. *Kelebihan Uang: Kok APBN Dibilang Jebol*. Majalah Detik 2 April 2012. Jakarta.
- Oktaviani, R. 2011. *Model Ekonomi Keseimbangan Umum (Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. IPB PRESS. Bogor.
- Salvatore, D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Munandar [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.

# Analisis Kebijakan Energi Nasional

Persoalan tata kelola energi nasional, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) telah begitu menguras konsentrasi bangsa kita. Aspek pengelolaan hulu hingga hilir energi perlu perbaikan serius. Rakyat Indonesia diperlihatkan keragu-raguan pengambil kebijakan yang terbukti kontraproduktif. Padahal, BBM merupakan kebutuhan dasar yang menentukan hajat hidup orang banyak.

Buku ini menyajikan analisis kebijakan energi nasional yang berkaitan dengan bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Peternakan, Teknologi Pertanian, Politik, Ekonomi, dan Sosial Masyarakat. Pendekatan multidisiplin diharapkan dapat memperkaya khasanah dan kajian dalam tata kelola energi di Indonesia. Buku ini sekaligus merupakan ikhtiar akademisi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

## PT Penerbit IPB Press

Kampus IPB Taman Kencana  
Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128  
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ymail.com



Penerbit IPB Press



@IPBpress

Energi

ISBN : 978-979-493-652-8



9 789794 936528